

**PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO**

**DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1982**

DEPARTEMEN PENERANGAN RI

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1982

DEPARTEMEN PENERANGAN RI



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota Dewan yang saya muliakan;

Para hadirin yang saya hormati :

Sudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dengan melampaui liku-liku jalannya perjuangan, maka besok pagi, tanggal 17 Agustus, kita semua akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Kita telah merdeka 37 tahun : hidup menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, terhormat dan bertanggung jawab.

Proklamasi 17 Agustus 45 adalah peristiwa yang paling besar dan paling menentukan dalam sejarah dan kehidupan kita sebagai bangsa. Karena itu setiap kali kita memperingati hari yang paling bersejarah itu, marilah kita pusatkan pikiran dan hati kita kepada semangat, dasar dan cita-cita kemerdekaan. Dengan semangat dan sikap demikian marilah kita lihat tempat dan kedudukan kita sekarang dalam perjalanan besar bangsa kita mengarungi sejarah untuk membangun masa depan yang kita cita-citakan bersama.

Tahun 82 ini mempunyai arti yang penting dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Karena itu, Hari Proklamasi Kemerdekaan 1982 kita peringati dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Kita merasa syukur karena kita telah melaksanakan Pemilihan Umum 1982, salah satu tugas nasional yang besar, dengan tertib dan selamat. Pemilihan Umum 1982 adalah yang ketiga kali kita laksanakan sejak kita menegakkan Orde Baru, orde yang bertekad bulat menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita laksanakan Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali dalam rangka menegakkan perangkat dan sistem yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka penyusunan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi dan Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang.

Dengan berhasilnya pelaksanaan Pemilihan Umum itu kita merasakan tanggung jawab yang sebesar-besarnya, karena dalam bulan Maret tahun depan akan berlangsung Sidang Umum MPR yang segera akan diresmikan pembentukannya pada 1 Oktober yang akan datang. Dalam Sidang itu Lembaga Negara Tertinggi kita MPR, pemegang kedaulatan rakyat, akan menetapkan arah kebijaksanaan utama bagi pembangunan tahap selanjutnya.

Dalam pada itu kita juga bersyukur bahwa berkat kerja keras kita semua, pelaksanaan REPELITA III sampai pada tahun ketiga 1981/82, telah mencapai hasil-hasil dan pertumbuhan yang mengembirakan, di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang suram sebagai akibat resesi yang dalam yang berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Kemajuan dan hasil-hasil yang kita capai itu bahkan telah meningkatkan taraf kehidupan bangsa, sehingga Indonesia sekarang tidak lagi digolongkan sebagai negara yang berpenghasilan rendah, melainkan sebagai negara yang berpenghasilan sedang.

Dengan hasil-hasil semacam itu, bangsa kita dewasa ini dicambuk dan ditantang bagaimana dapat melanjutkan dan memacu lebih cepat lagi pelaksanaan pembangunan di masa-masa mendatang dalam rangka secepatnya memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi mendasar yang masih membentangi di hadapan kita seperti masalah kependudukan, lapangan kerja, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai bangsa pejuang yang mempunyai cita-cita dan nilai luhur, kita tidak akan mudah puas dengan apa yang telah kita capai. Kita sadar bahwa cita-cita besar tidak akan mudah dicapai dan nilai-nilai luhur yang kita miliki juga tidak ringan mempertahankannya agar terus tumbuh menjiwai sikap dan perbuatan kita sebagai bangsa. Jiwa pejuang selalu mendorong kita untuk senantiasa mengadakan perbaikan dan untuk mengusahakan keadaan yang lebih sempurna.

Sebagai bangsa pejuang yang bercita-cita luhur kita akan terus menerus mengusahakan kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan -kalau perlu disertai dengan koreksi atas kekeliruan-kekeliruan yang ada- dalam perjalanan menuju cita-cita kita, yaitu masyarakat yang maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Kita juga sadar bahwa keadaan kita sekarang mungkin akan lebih buruk atau lebih parah, sekiranya kita tidak berhasil mengatasi berbagai ragam bahaya yang pernah menghadang kita dalam perjalanan sejarah selama 37 tahun yang lewat.

Kita dapat membayangkan bagaimana keadaan kita sekarang ini, sekiranya kita dahulu tidak berhasil mengatasi bahaya perpecahan dan juga ancaman dari kekuatan-kekuatan ekstrim kiri maupun kanan dan andaikata Orde Baru tidak berhasil mencapai kemajuan dalam pembangunan besar-besaran dan menghentikan kemerosotan ekonomi yang parah. Perjuangan untuk mengatasi segala macam bahaya, ancaman serta hambatan-hambatan tadi

telah meminta pengorbanan yang ikhlas dari semua golongan dan lapisan bangsa kita, tanpa ada kecualinya. Pada tempatnya lah apabila kita saat ini mengenang semua pengorbanan itu dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu juga berarti bahwa kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan agar bahaya, ancaman dan hambatan yang pernah kita atasi dahulu tidak akan terulang kembali selama lamanya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-37 berarti bahwa Angkatan '45 telah menyumbangkan darma baktinya selama 37 tahun dalam perjuangan negara dan bangsa kita. Kehadiran suatu generasi dalam sejarah bangsa umumnya hanya berlangsung sekitar setengah abad. Karena itu jelas saat ini merupakan bagian-bagian akhir dari darma bakti Angkatan '45. Pada tempatnya lah apabila pada saat-saat seperti ini Angkatan '45 mengadakan renungan ulang mengenai pengalamannya, baik keberhasilan maupun kegagalannya selama ini, sambil menanyakan apa yang masih harus dan dapat dijalankan dalam sisa masa pengabdianya untuk menyelesaikan, merampungkan dan membulatkan darma baktinya sebagai Generasi Pembebas dalam sejarah bangsa ini.

Suatu generasi yang lebih muda, yaitu Generasi Penerus, yang umumnya dahulu masih terlalu muda untuk ambil bagian yang aktif dalam Perang Kemerdekaan, sekarang telah mulai ikut berperan dalam penyelenggaraan negara dan bangsa kita. Peran mereka akan bertambah besar dalam tahun-tahun mendatang. Pada dasarnya peralihan tanggung jawab antar generasi adalah proses yang wajar dan alamiah.

Kedudukan suatu Generasi Pembebas dalam sejarah suatu bangsa adalah kedudukan yang terhormat dan sekaligus bertanggung jawab. Sebab apa yang ditinggalkan oleh Generasi Pembebas itu merupakan dasar dan teladan bagi Generasi Penerus dan

generasi-generasi berikutnya. Dengan sendirinya Generasi '45 sebagai Generasi Pembebas bertekad untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan meluruskan apa yang perlu diluruskan, agar mereka dapat mewariskan yang terbaik sebagai dasar yang kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan negara ini di tahun-tahun, dasawarsa-dasawarsa, malahan berabad-abad yang akan datang, sesuai dengan cita-cita dan harapan kita yang luhur itu.

Selama lebih dari dua dasawarsa sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai pertengahan dasawarsa 60-an, bangsa dan negara kita berada dalam suasana perang dan revolusi untuk mengatasi ancaman kolonialisme Belanda dan sisa-sisanya, ancaman perpecahan dan demikian juga ancaman dari ekstrim kiri maupun kanan.

Pengalaman selama dua dasawarsa perang dan revolusi itu pada satu pihak telah memberi hasil-hasil yang sangat positif bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kesatuan dan persatuan serta harga diri dan kepribadian bangsa ini telah mengalami gemblengan yang maha hebat dalam kancah perang dan revolusi. Dalam proses penggemblengan yang disertai dengan ujian-ujian berat itu, kita bertambah yakin bahwa hanya Pancasila lah yang akan melanggengkan persatuan kita dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan bersama yang kita dambakan.

Pada pihak lain, kurun waktu dua dasawarsa perang dan revolusi itu telah meninggalkan luka-luka yang berat pada tubuh kita sebagai bangsa, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial.

Kurun waktu perang dan revolusi selama dua dasawarsa tadi juga mempengaruhi kehidupan politik dan perkembangan sistem politik kita. Selama bertahun-tahun kita mempraktekkan demokrasi parlementer dengan sistem multi partai. Dengan melaksanakan Pemilihan Umum 1955 kita dahulu mengharapkan datangnya stabilitas politik yang mantap, sehingga kita dapat memasuki kurun waktu pembangunan. Tetapi kita mengalami kekecewaan

yang besar. Hasil Pemilihan Umum waktu itu tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil dan efektif seperti yang kita harapkan, bahkan suatu ketika melahirkan pemberontakan-pemberontakan yang merobek-robek tubuh bangsa ini. Dewan Konstituante yang dihasilkan oleh Pemilihan Umum menjadi arena pertarungan mengenai dasar negara yang dipersoalkan kembali dan karena konstituante ini tidak berhasil mengambil keputusan, maka didekritkan kembali berlakunya Undang Undang Dasar '45, yang memang mendapat dukungan bagian besar rakyat kita.

Kecewa dengan demokrasi parlementer dengan sistem multi-partai, maka lahir lah pandangan dan dikembangkan lah Demokrasi Terpimpin. Tetapi Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan dengan memelihara dan membangkitkan iklim revolusi itu ternyata juga tidak memberi hasil yang diharapkan, malahan menimbulkan bencana nasional yang hampir-hampir meruntuhkan Negara Proklamasi dengan meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI.

Dalam keadaan seperti itu lah kita memasuki Orde Baru. Orde Baru bertekad untuk melanjutkan perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan. Orde Baru bertekad untuk mengadakan koreksi total dalam cara-cara perjuangan untuk mencapai cita-cita tadi. Yang ditekankan tidak lagi perang dan revolusi, melainkan pembangunan dalam arti seluas-luasnya. Dan pembangunan itu kita laksanakan dengan menjalankan Pancasila dan Undang Undang Dasar '45 secara murni dan konsekwen. Cara-cara untuk mengatur kehidupan politik yang dahulu ternyata tidak dapat membawa stabilitas nasional dan menggerakkan pembangunan dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan dan harus diperbaharui setelah kita memasuki Orde Baru, Orde Pembangunan.

Dalam hubungan inilah kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa selama Orde Baru ini kita mengalami stabilitas politik yang mantap dan telah mengadakan 3 kali Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pemilihan Umum yang berlangsung secara berkala sekali 5

tahun itu, juga mencerminkan betapa bulat tekad kita untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi di negeri ini.

Untuk kali ini, puncak pesta demokrasi telah berlalu pada hari pemungutan suara tanggal 4 Mei yang lalu. Pada tanggal 4 Mei itulah lebih dari 91% dari seluruh warga negara Indonesia yang berhak memilih telah secara serentak menggunakan haknya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD-I dan DPRD-II, dan tentunya juga yang akan duduk di MPR.

Adalah hal yang wajar ada peserta Pemilihan Umum yang mendapat suara yang besar atau yang kecil dari rakyat. Yang menang tidak harus silau dengan kemenangannya, yang kalah tidak perlu berkecil hati. Sebab, dalam Demokrasi Pancasila yang penting adalah tegak dan suburnya demokrasi itu, yang kita rasakan sebagai kemenangan bersama.

Selaku Mandataris MPR yang ditugasi melaksanakan Pemilihan Umum itu saya menyampaikan terima kasih serta ucapan selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia, pada segenap aparatatur pemerintahan dan alat-alat keamanan negara yang telah bersama-sama menyelesaikan tugas dan karya nasional yang besar ini. Ucapan dan perasaan yang sama saya tujukan kepada ketiga peserta Pemilihan Umum : Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

Namun sebagai bangsa yang ingin tumbuh kokoh kuat, kita harus berani terus menerus mengadakan introspeksi dan koreksi. Pemilihan Umum bulan Mei tahun ini telah menjatuhkan korban-korban, malahan ada yang tewas sebagai akibat ekkses-ekkses perbuatan kebringasan unsur-unsur peserta Pemilihan Umum dalam masa kampanye Pemilihan Umum. Kita semua, dan saya pribadi, menyampaikan rasa duka dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tewasnya korban-korban ini. Selama masa kampanye, di beberapa daerah telah timbul gejala-gejala kebringasan, yang jika tidak dapat teratasi waktu itu bukannya tidak mungkin menda-tangkan bencana bagi bangsa kita.

Padahal kita semua sadar dan sepakat bahwa Pemilihan Umum adalah bagian dari pembangunan politik dalam rangka pembangunan besar bangsa kita.

Pembangunan itu kita lihat sebagai Pengamalan Pancasila. Dalam jangka panjang maka kelestarian Pancasila akan terjamin apabila semua golongan dan lapisan bangsa kita telah terbiasa untuk mengamalkan Pancasila melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan bersamaan dengan itu kita laksanakan pembangunan yang berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat Pancasila. Sebab dengan bersama-sama mengamalkan Pancasila melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tadi, maka semua golongan dan lapisan akan terbiasa untuk memberi sumbangan pikiran dan kegiatan yang nyata dalam mengamalkan Pancasila itu, dalam mewujudkan masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan bersama.

Sebagai bagian dari kekuatan bangsa, kekuatan-kekuatan sosial politik pun harus merupakan kekuatan pembangunan. Karena itu kekuatan-kekuatan sosial politik harus membawa aspirasi dan harus menjadi perancang pembangunan yang berdasarkan Pancasila tadi.

Itu lah sebenarnya yang kita pikirkan dan yang kita inginkan mengapa kita menghendaki pembaharuan kehidupan politik, seperti yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR(S) Nomor XXII tahun 1966.

Pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik menyangkut dua segi sekaligus ialah pembaharuan wadah maupun isinya. Dengan kata lain : menyangkut penyederhanaan struktur dan pembaharuan semangat, sikap serta gerak kekuatan sosial politik kita.

Mengenai penyederhanaan struktur -seperti tadi saya singgung- maka sistem multi-partai ternyata gagal untuk membina stabilitas politik, untuk membangun pemerintahan yang efektif,

dan karena itu gagal mengantarkan bangsa ini pada kiprahnya pembangunan. Karena itu sejalan dengan tekad Orde Baru untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang kehidupan bangsa maka sejak semula kita telah berusaha untuk menyederhanakan jumlah wadah-wadah kekuatan sosial politik yang ada waktu itu seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR(S) Nomor XXII tahun 1966 yang disebutkan di atas. Karena Orde Baru menghendaki ketertiban yang mantap dan berkembangnya demokrasi yang sehat, maka penyederhanaan jumlah wadah kekuatan sosial politik ini pun dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Penyederhanaan struktur politik tidak dilakukan dengan paksaan, tidak dengan pembubaran partai-partai politik. Kita percaya pada demokrasi, karena itu cara-cara demokratis lah yang kita tempuh.

Sebagai Mandataris MPR(S) waktu itu, saya kemukakan gagasan saya kepada Pimpinan Partai-partai Politik dan Golongan Karya, bahwa pembaharuan kehidupan politik kita harus berpangkal pada konsensus nasional Orde Baru, ialah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 secara murni dan konsekwen.

Ini berarti bahwa asas kekuatan sosial politik tidak bisa lain dari Pancasila dan tujuannya juga tidak bisa lain dari membangun masyarakat Pancasila. Karena pembangunan masyarakat Pancasila berarti membangun manusia seutuhnya, maka pembangunan itu adalah pembangunan lahir dan pembangunan batin, pembangunan material dan pembangunan spiritual, yang kita lakukan secara seimbang sehingga terus mempertinggi harkat dan martabat manusia. Karena itu lah dasar yang sehat bagi pembaharuan kehidupan politik dan penyederhanaan struktur politik bukanlah ideologi golongan, melainkan orientasi pada pembangunan masyarakat Pancasila. Jelasnya, kekuatan-kekuatan sosial politik dengan berasaskan pada satu ideologi Pancasila perlu memusatkan perhatiannya pada pembangunan material tanpa mengabaikan

pembangunan spiritual, atau pada pembangunan spiritual tanpa mengabaikan pembangunan material, atau mengusahakan pembangunan dengan karya-karya yang menseimbangkan pembangunan material dan spiritual itu sekaligus.

Itulah yang menjadi dasar pemikiran saya untuk melaksanakan kehendak nasional dalam rangka pembaharuan kehidupan politik dan penyederhanaan struktur politik kita pada awal lahirnya Orde Baru. Atas dasar pokok pemikiran seperti yang saya uraikan tadi, maka menurut pandangan saya ke-9 Partai Politik dan 1 Golongan Karya yang ada waktu itu dapat disederhanakan pengelompokannya menjadi : (1) Kelompok yang memperjuangkan tercapainya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang menitik-beratkan bidang spiritual tanpa mengabaikan bidang material, yaitu kelompok yang terdiri dari Partai-partai : NU, MI, PSII dan Perti; (2) Kelompok yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang menitik-beratkan bidang material tanpa mengabaikan bidang spiritual, ialah kelompok yang terdiri dari Partai-partai : PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katholik; (3) Kelompok yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang mengutamakan baik bidang spiritual maupun material, ialah kelompok Golongan Karya. Sejak semula saya berkeyakinan bahwa pembangunan bangsa akan berhasil apabila didukung dan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik yang mengemban pengabdian yang berdasarkan atas satu ideologi -ialah Pancasila- serta memperjuangkan tercapainya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang seimbang antara spiritual dan material.

Pokok-pokok pikiran saya itu dapat diterima, yang kemudian dapat membuka jalan kearah penyederhanaan jumlah wadah-wadah kekuatan sosial politik menjadi tiga, ialah dua Partai Politik dan satu Golongan Karya seperti yang kita kenal sekarang.

Namun pada waktu itu, Undang-undang Kepartaian dan Keormasan belum juga dapat diselesaikan oleh Pemerintah bersama-sama DPR sampai pelaksanaan Pemilihan Umum '71, sehingga dalam Pemilihan Umum tahun 1971 kontestan Pemilihan Umum masih terdiri dari 9 Partai Politik dan Golongan Karya.

Meskipun penyederhanaan struktur politik belum juga berhasil kita laksanakan menurut hukum/undang-undang, namun penyederhanaan itu telah mulai dilaksanakan dalam praktek di lembaga legislatif kita DPR. Dalam DPR hasil Pemilihan Umum '71 dapat dibentuk empat fraksi yang terdiri dari dua fraksi Partai Politik, satu fraksi Golongan Karya dan fraksi ABRI. Dua fraksi Partai Politik, ialah Fraksi Persatuan Pembangunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mewakili Partai-partai : NU, MI, PSII dan Perti, dan Fraksi Demokrasi Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang mewakili Partai-partai : PNI, IPKI, MURBA, PAR-KINDO dan Katholik.

Dalam hubungan ini pada upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR pada tanggal 28 Oktober '71, saya antara lain menyatakan sebagai berikut : "Apabila fraksi-fraksi yang demikian itu dapat terbentuk dan berfungsi secara mantap, maka bukan saja kerjasama dalam kelompok-kelompok fraksi itu dapat lebih erat dan kompak, tetapi juga akan berpengaruh dan dapat dijadikan alat mekanisme yang efektif bagi cara kerja DPR -dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat pada umumnya-; dan juga dalam melaksanakan kehidupan politik dan ketata-negaraan kita selanjutnya.

Bagi kehidupan kepartaian di hari depan, apabila kehidupan fraksi-fraksi ini dapat terus dibina dan menciptakan kerjasama dan suasana persatuan yang efektif, maka praktek ini akan dapat dikembangkan di luar lembaga perwakilan, sehingga diharapkan akan memudahkan pembentukan Undang-undang Kepartaian itu sendiri; setidaknya-tidaknya akan menyederhanakan pelaksanaan Pemilihan

Umum dalam tahun 1976 yang akan datang, yang dapat memunculkan hanya tiga tanda gambar saja ialah "Kelompok Persatuan Pembangunan", "Kelompok Demokrasi Pembangunan" dan "Golkar". Itulah yang saya katakan waktu itu.

Dan ternyata pertumbuhan fraksi-fraksi itu serta tekad untuk melembagakan fraksi-fraksi itu menjadi organisasi politik yang mantap makin ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara hasil Sidang Umum MPR tahun '73. Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1973 pada Arah dan Kebijakan Pembangunan bidang Politik disebutkan antara lain sebagai berikut

"Dalam rangka mempercepat proses pembaharuan dan penyerderhanaan organisasi kekuatan kekuatan sosial politik, baik partai politik maupun golongan karya dewasa ini telah memperlihatkan orientasinya kepada perkembangan masyarakat yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan di seluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu dalam rangka membina kehidupan politik yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan, maka struktur, jumlah maupun sikap mental dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik tersebut, telah dapat mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya. Dengan terdapatnya tiga pengelompokan tersebut yang merupakan wadah penampungan dari seluruh aspirasi masyarakat, maka pada Pemilihan Umum yang akan datang hanya akan ada tiga Tanda Gambar".

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan GBHN itu dan juga dalam rangka persiapan Pemilihan Umum tahun '77 dapatlah dihasilkan Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menetapkan adanya dua Partai Politik dan satu Golongan Karya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975). Dan berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum yang disempurnakan juga ditetapkan bahwa peserta Pemilihan Umum yang

diselenggarakan pada tahun '77 adalah terdiri dari dua Partai Politik dan Golongan Karya.

Dalam pada itu Partai-partai Politik yang ada, yang waktu itu sembilan jumlahnya, dengan kesepakatan di antara partai-partai itu sendiri, telah mengadakan fusi sehingga terbentuklah Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari penggabungan Partai-partai : NU, MI, PSII dan Perti, dan Partai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari penggabungan Partai-partai : PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katholik.

Semuanya ini menunjukkan adanya kemajuan besar dalam usaha kita untuk menata kembali kehidupan politik, walaupun usaha itu tidak mudah. Lebih dari sepuluh tahun diperlukan untuk menyederhanakan struktur politik kita sampai dapat dihasilkan Undang-undang yang memberikan jaminan dan kedudukan hukum pada organisasi Partai Politik dan Golongan Karya, yang sekaligus juga merupakan pelaksanaan dari pasal 28 Undang Undang Dasar '45.

Ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan hati kita untuk maju bersama-sama secara demokratis dalam rangka membangun dan menata kembali kehidupan politik, agar sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pembangunan bangsa di segala bidang. Karena itu, seperti pernah saya katakan, pembangunan demokrasi memang merupakan bagian yang sulit dari pembangunan bangsa kita.

Sekarang, 16 tahun setelah lahirnya keinginan nasional untuk memperbaharui kehidupan politik kita, setelah kita bertambah kaya dengan pengalaman tiga kali Pemilihan Umum, maka kita masih harus melanjutkan, merampungkan dan membulatkan secara tuntas proses pembaharuan kehidupan politik. Jumlah dan struktur Partai Politik seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya kiranya sudah memadai, terbukti dari hasil dua kali Pemilihan Umum. yang diikuti oleh ketiga kontestan. Yang perlu dibulatkan dan ditegas-

kan adalah asas yang dianut oleh setiap Partai Politik dan Golongan Karya.

Semua kekuatan sosial politik -terutama Partai Politik yang masih menggunakan asas lain selain asas Pancasila- seharusnya lah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila.

Penegasan dan kebulatan ini penting, bukan saja karena sekarang kita telah memiliki P4 yang menjadi pedoman dan penuntun kita dalam kehidupan dan pembangunan masyarakat Pancasila; bukan saja karena zaman di depan kita harus kita isi dengan perhatian, pengabdian dan keraa keras yang sepenuh-penuhnya untuk melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan; tetapi terlebih-lebih mutlak agar kita tidak selalu dihinggapai kerawanan-kerawanan yang menghantui timbulnya perpecahan dan kekacauan dengan kekerasan, karena ulah kita sendiri.

Adanya asas lain -di samping asas Pancasila- yang menjadi ciri khas dari partai itu akan merangsang unsur-unsur ekstrim - baik dari dalam maupun dari luar- untuk lebih menonjolkan asas yang lain itu pada saat-saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa-masa menjelang Pemilihan Umum. Didorong oleh naluri untuk menunjukkan identitas golongan, maka asas lain ini lah -bukan asas Pancasila- yang ditonjolkan dalam masa kampanye. Ini akan mudah merangsang fanatisme kelompok yang sempit, yang dapat dimanfaatkan oleh golongan ekstrim yang terdapat dalam kelompok yang bersangkutan atau di luarnya, yang sulit dikendalikan.

Inilah antara lain yang menjadi sebab, mengapa dalam musim kampanye Pemilihan Umum yang lalu, di sana-sini timbul kebringasan yang telah mengarah kepada kekerasan dalam perjuangan politik, yang akhirnya. mendatangkan korban jiwa.

Berlandaskan pada . kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka semua kekuatan sosial politik, khususnya Partai Politik sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila. Saya yakin dengan sikap yang demikian Partai yang bersangkutan akan dapat tumbuh semakin kokoh dan makin memperoleh kepercayaan dari rakyat.

Bukankah rakyat sudah bertekad untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila? Karena dengan mengamalkan Pancasila dan dalam alam Pancasila itulah, rakyat kita yang penuh kemajemukan itu -termasuk majemuk dalam hal agama- akan dapat menumbuhkan dan mengamalkan kebhinnekaan itu dalam suasana tenteram dan kekeluargaan.

Dari Pemilihan Umum yang lalu kita juga dapat menarik pelajaran bahwa rakyat kita ternyata menolak penggunaan kekerasan dalam kehidupan berpolitik. Sejarah politik kita selama masa kemerdekaan memang telah menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan dalam perjuangan politik di antara kita tidak pernah membawa hasil, malahan berakhir dengan kegagalan. Rakyat kita lebih menerima pendekatan yang persuasif dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Sikap rakyat itu merupakan modal yang sangat berharga dan menjadi tempat persemaian yang subur bagi perkembangan kehidupan politik yang sehat berdasarkan Pancasila.

Kenyataan ini hendaknya kita ingat bersama terutama oleh para pemuka dan pemimpin masyarakat baik pada tingkat nasional, pada tingkat daerah atau tingkat lain yang lebih bawah.

Saya pernah menyerukan agar kita mengembangkan budaya politik yang berkeadaban, yang menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Ini sesuai dengan warisan budaya kita sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi.

Pikiran-pikiran kita mengenai politik, cara-cara kita berpolitik, hendaknya tetap bersumber dan memancarkan nilai-nilai

luhur dari Pancasila itu. Pancasila harus berfungsi sebagai pengendali dari kehidupan politik kita. Derigan berlandaskan pada Pancasila itulah kita susun program-program dan kita perjuangkan pelaksanaan program-program tersebut, program-program untuk mengisi kehidupan kita bersama dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Dengan memperjuangkan program-program pembangunan yang demikian itu, dengan kemungkinan penonjolan dan perbedaan dalam tekanan dan pengutamakan, maka akan terciptalah dorongan dinamika untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada kesatuan dan keutuhan landasan ideologi yang telah kita sepakati bersama: Pancasila.

Marilah kita camkan dan kita kembangkan praktek kehidupan politik. yang demikian itu, dalam menghadapi tugas-tugas nasional yang besar yang ada di hadapan kita; dalam Sidang Umum MPR yang akan datang dan terus kita tumbuhkan dan kita praktekkan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum lima tahun yang akan datang dan seterusnya.

Dengan sikap bersama yang demikian itu, maka yang saya katakan setahun yang lalu di hadapan Dewan yang terhormat ini, ialah : Persatuan untuk membangun dan membangun untuk memperkokoh persatuan; bukan saja harus menjadi semboyan kita semua, melainkan akan terlaksana dalam praktek, dan akah menjadi hasil besar generasi kita yang dapat kita wariskan kepada generasi penerus yang akan datang.

Saudara Pimpinan Sidang yang terhormat;
Sidang Dewan yang terhormat;

Dalam pada itu, dalam melaksanakan pembangunan sebagai tugas sejarah kita yang terbesar sekarang ini, kita terus mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat. Namun kita juga menyadari,

bahwa pembangunan sebagai proses sejarah yang begitu luas jangkauannya dengan beribu-ribu seginya, yang menyangkut bangsa yang berjumlah lebih dari 150 juta orang, yang menghuni Nusantara yang demikian luas dan terdiri lebih dari 13.000 pulau, tentulah tidak akan berhasil tanpa pengorbanan, tidak mungkin tanpa kekecewaan, tidak mungkin berjalan tanpa kesalahan dan tidak mungkin pula tanpa ketidakpuasan. Dalam proses pembangunan yang demikian, banyak kebiasaan dan pola berpikir yang lama harus kita tinggalkan; dan ada pula timbul kebiasaan dan pola berpikir baru yang keliru. Pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan. Dalam proses itu tidak jarang terjadi perbedaan kecepatan perubahan dan pertumbuhan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan kita melahirkan kehampaan atau kekacauan tata nilai, memperbesar ketidakadilan serta mempersempit tanggung jawab dan partisipasi rakyat.

Kadang-kadang ada yang memberi gambaran seolah-olah dalam era pembangunan ini kita telah terhinggapi berbagai penyakit yang sudah begitu parah, ketidakadilan begitu merajalela, sehingga kita akan mengalami kegagalan total. Kita menghargai kritik-kritik dan peringatan seperti itu. Namun hendaknya janganlah kita bersikap destruktif dan kalap, seolah-olah hari depan kita diliputi kegelapan. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak beralasan. Seharusnya kita tetap mempunyai kepercayaan kepada kemampuan bangsa kita untuk terus menerus menjamin adanya kesinambungan, peningkatan, koreksi dan pembaharuan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, karena ternyata kita telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan bangsa selama ini.

Walaupun kita masih harus mengejar ketertinggalan kita, masih ada di antara kita yang taraf hidupnya tergolong rendah, namun sebagai bangsa, sebagai hasil pembangunan, kita telah memasuki tingkat yang lebih maju.

Seperti tadi saya katakan, kita sekarang telah termasuk bangsa yang berpenghasilan sedang, meninggalkan tingkat bangsa yang berpenghasilan rendah. Dan ini kita capai di tengah-tengah dunia dilanda berbagai krisis ekonomi dan resesi.

Kemajuan yang besar itu harus dapat kita jaga kesinambungannya, kita manfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan pembangunan. Ini menambah keyakinan pada kita bahwa arah pembangunan yang kita tempuh selama ini benar, yang membuat kita tabah untuk terus maju bersama membangun masa depan yang kita cita-citakan.

Saudara-saudara, Pimpinan Sidan yang terhormat;

Sekarang saya ajak Sidang Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mengamati lebih dalam kemajuan-kemajuan dalam berbagai sektor yang penting.

Pertama tama dapat kita catat bahwa stabilitas ekonomi dapat kita mantapkan, di tengah-tengah keadaan dunia yang dilanda inflasi yang berkepanjangan. Dalam tahun 1981 yang lalu laju inflasi adalah 7%, sedangkan dalam tahun 1980 sebesar 16%. Untuk tahun anggaran 1981/82 laju inflasi adalah 9,8%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM setinggi 60%, sehingga mempengaruhi tingkat inflasi dalam bulan Januari 1982 yang mencapai sampai 4,7%.

Untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun 1982 kenaikan harga sangat terkendali, sehingga dalam 7 bulan pertama tahun 1982 -setelah bulan puasa dan lebaran- tingkat inflasi berada di bawah 7%, yang berarti dalam 6 bulan terakhir adalah kurang dari 2,3%. Untuk bulan-bulan berikutnya dalam tahun 1982 ini diha-

rapkan keadaan harga-harga tetap stabil, sehingga laju inflasi tidak akan melartjak.

Dalam pada itu keadaan neraca perdagangan luar negeri kita mau tidak mau mengalami dampak negatif dari keadaan resesi dan krisis ekonomi dunia dewasa ini. Sejak permulaan tahun 1981 ekspor barang non minyak kita -hasil-hasil perkebunan dan pertambangan- terasa mengalami keseretan, baik disebabkan oleh berbagai langkah proteksi yang diambil oleh berbagai negara konsumen, maupun karena turunnya harga barang-barang ekspor itu di pasaran internasional. Ini tentu perlu mendapatkan perhatian kita yang serius dan kewaspadaan yang terus menerus. Dalam rangka ini Pemerintah telah mengambil serangkaian kebijaksanaan yang menyeluruh untuk mendorong ekspor barang-barang non minyak, dengan mengusahakan berbagai kemudahan dan keringanan untuk ekspor barang-barang non minyak. Di samping itu pembelian barang-barang impor untuk keperluan pemerintah dan perusahaan milik negara dikaitkan dengan kewajiban mengekspor barang-barang non minyak ke negara yang bersangkutan. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan dalam bulan Januari 1982 yang lalu.

Pelaksanaan kebijaksanaan ini sudah barang tentu tidaklah mudah namun hasil-hasilnya telah mulai kita rasakan.

Dalam hubungan ini saya perlu menegaskan bahwa berkat usaha-usaha dan langkah-langkah penghematan penggunaan devisa yang lalu, seperti tindakan Knop 15, pembatasan impor barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan barang-barang mewah, serta pelaksanaan yang konsisten dari kebijaksanaan mendorong ekspor yang sekarang ini sedang kita tempuh, maka keadaan cadangan devisa kita sekarang tetap dalam batas yang cukup. Pemerintah berpendapat dan menegaskan tidak perlu mengadakan devaluasi rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap

uang asing akan tetap dibiarkan mengambang terkendali seperti sekarang ini.

Pemerintah akan terus berusaha serta mencari jalan untuk mendorong ekspor barang-barang non minyak kita, bukan saja karena kita sangat memerlukan devisa yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan impor barang-barang yang belum dapat kita produksi sendiri, tetapi juga karena barang-barang ekspor hasil perkebunan dan pertambangan itu menyangkut jutaan buruh dan petani perkebunan, yang mendambakan hidupnya dari hasil-hasil ekspor itu.

Dengan terjaminnya stabilitas ekonomi serta usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan produksi di berbagai bidang, maka pertumbuhan ekonomi kita secara nasional dalam tahun 1981 yang lalu cukup tinggi, ialah 7,6%. Ini sungguh membesarkan hati, karena dibanding dengan tingkat pertumbuhan negara-negara lain di dunia, baik negara-negara industri maupun negara-negara yang sedang berkembang tingkat pertumbuhan kita termasuk salah satu yang tertinggi.

Pertumbuhan ekonomi kita itu disebabkan oleh kenaikan produksi di berbagai bidang, baik bidang pertanian, industri maupun bidang jasa.

Di bidang pertanian kita sungguh bersyukur bahwa dalam tahun 1980 dan 1981, kita telah berhasil menaikkan produksi beras kita cukup tinggi secara berturut-turut, ialah sekitar 13% dan 10%, sehingga dalam tahun 1981 mencapai 22,2 juta ton. Ini berarti bahwa kita telah dapat mencapai sasaran produksi beras yang direncanakan dicapai dalam tahun kelima REPELITA III sebesar 20,5 juta ton, dua tahun lebih cepat. Dalam tahun 1982 ini diperkirakan produksi beras kita juga akan naik, sehingga mencapai sekitar 23 juta ton. Dengan kenaikan produksi beras yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, praktis kita telah dapat mencapai swasembada beras dalam tahun 1982 ini.

Pengadaan beras dari dalam negeri untuk stok nasional setiap tahunnya terus meningkat. Dalam tahun 1982 ini hasil pembelian beras dan gabah diharapkan mencapai 2 juta ton, sedangkan stok equivalen beras yang dikuasai BULOG mencapai lebih dari 2,7 juta ton.

Di samping produksi beras, produksi palawija seperti jagung, kacang tanah dan kedelai juga naik, karena bimas palawija juga makin digalakkan.

Kenaikan produksi juga tampak di bidang peternakan, baik ternak sapi, unggas maupun hasil-hasilnya seperti daging, telur dan susu. Pada tahun-tahun terakhir ini Pemerintah telah mengimpor bibit ternak dalam jumlah yang cukup besar untuk dibimaskan kepada para petani/peternak. Adalah kebijaksanaan dari Pemerintah untuk mendorong usaha peternakan ini, seperti usaha pertanian lainnya, sebagai usaha rakyat yang tergabung dalam koperasi.

Bidang perikanan juga mengalami kenaikan produksi, terutama perikanan darat. Sedangkan perikanan laut mengalami penurunan 0,6% dalam tahun terakhir ini, yang disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah untuk menghapuskan trawl, karena meresahkan nelayan tradisional dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan sumber daya alam. Namun dengan digantinya peralatan trawl dengan alat lain yang tidak akan membahayakan lingkungan dan dengan menggalakkan bimas perikanan, khususnya perikanan tambak, diharapkan produksi ikan dan udang kita akan cepat meningkat lagi.

Di bidang perkebunan, berbagai produksi seperti kopi, karet dan lada serta kelapa sawit yang merupakan tanaman-tanaman ekspor juga mengalami kenaikan, karena kita dapat memperluas areal tanaman maupun memperbesar produktivitas. Akan tetapi nilai ekspor dari hasil perkebunan ini menurun cukup besar, yang disebabkan oleh resesi ekonomi dunia. Produksi gula kita juga meningkat, berkat perluasan areal tanaman dan peningkatan

produktivitas pabrik dengan adanya pabrik baru maupun rehabilitasi mesin-mesin pabrik yang telah tua. Dengan peningkatan produksi ini maka keperluan mengimpor gula sangat berkurang. Usaha peningkatan produksi gula ini akan kita lanjutkan, baik dengan rehabilitasi pabrik-pabrik yang telah tua, maupun dengan membangun pabrik-pabrik gula baru yang dewasa ini sebagian telah dimulai. Untuk makin memadukan kebijaksanaan dan mengefektifkan pengelolaan produksi gula yang akan terus ditingkatkan, Pemerintah telah membentuk Dewan Gula yang diketuai oleh Menteri Pertanian.

Dalam pada itu produksi kayu olahan mengalami kenaikan-kenaikan yang besar, sedangkan ekspor kayu gelondongan menurun sangat drastis. Ini sesuai dengan langkah yang kita ambil untuk membatasi ekspor kayu gelondongan dan makin banyak mengolah kayu gelondongan itu agar nilainya meningkat dan agar dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam tahun-tahun yang akan datang produksi dan ekspor kayu olahan akan dapat ditingkatkan terus, dengan selesainya sejumlah pabrik pengolah kayu baru yang dewasa ini sedang dalam pembangunan.

Saudara-saudara yang terhormat;

Pembangunan bidang pertanian akan terus kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, agar dapat menjadi pendukung yang kokoh bagi pembangunan industri menuju kepada ekonomi nasional yang seimbang antara pertanian dan industri, sebagai landasan bagi "take off" nya pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di bidang industri, pembangunannya dalam tahun '82 ini memasuki tahap yang makin meningkat. Hasil-hasil yang cukup memadai yang telah tercapai sampai tahun ke-3 REPELITA III makin mengarahkan perhatian dan upaya kita untuk melakukan persiapan-persiapan guna memasuki REPELITA IV.

Setelah cukup berkembangnya industri hilir berupa aneka industri, sejak REPELITA I sampai dengan pertengahan REPELITA III ini, maka sekarang kita terus meningkatkan usaha untuk memberikan kedalaman-kedalaman pada struktur dan pola industri nasional dengan pembangunan proyek-proyek industri dasar. Industri dasar ini lazim juga disebut sebagai industri hulu atau industri kunci dan bersamaan dengan itu kita bangun pula berbagai industri antara.

Pembangunan industri dasar dan industri antara telah kita mulai menjelang akhir REPELITA II, kemudian ditingkatkan dalam REPELITA III, seperti industri besi baja, industri aluminium, industri semen dan pupuk, industri serat buatan dan pulp, industri karet, industri kimia dasar dan lain sebagainya. Sampai dengan pertengahan tahun '82 telah dipersiapkan sebanyak 52 proyek industri kunci yang meliputi industri kimia dasar, industri logam dasar dan perluasan beberapa unit produksi aneka industri. Sebagian besar dari industri-industri ini diharapkan akan selesai dan mulai beroperasi menjelang akhir REPELITA III. Dalam waktu singkat akan dimulai pula pembangunan dari kompleks-kompleks petrokimia dan usaha-usaha industri hilirnya.

Dalam pengembangan industri dasar ini sekaligus telah diterapkan pula konsepsi wilayah-wilayah pusat pengembangan industri dan zona-zona industri sebagai kerangka pokok dan landasan untuk mendukung dan memperkokoh penyebaran industri hilir dan industri kecil. Industri kecil pun telah mendapat pembinaan yang meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya meningkat dalam arti perluasan tetapi meliputi pula pengarahannya dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Sementara itu terus dilanjutkan usaha-usaha modernisasi seluruh sektor industri, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, lebih-lebih mengingat besarnya peranan yang harus dijalankan oleh sektor industri dalam REPELITA IV dan REPELITA V nanti.

Seperti tadi saya singgung, peningkatan produksi pertanian dan industri ini telah mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Perkembangan ekonomi dan gerak pembangunan yang cepat tadi hanya mungkin terwujud karena kita juga telah berhasil membangun dan memperluas urat-urat nadi perekonomian kita, pembangunan prasarana ekonomi. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan raya telah dilaksanakan di mana-mana sampai mencapai pelosok-pelosok; demikian pula pembangunan dan perbaikan jembatan-jembatan besar dan kecil, pembangunan dan perbaikan lapangan-lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan, tambahan armada udara dan armada laut berikut penerbangan dan pelayaran perintisnya, perbaikan dan penambahan jumlah angkutan jalan raya dan kereta api, perluasan jaringan telepon dan kantor-kantor pos, dan banyak lainnya lagi, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu pada kesempatan ini. Kesemuanya telah sangat meningkatkan daya angkut dan perhubungan antar daerah dan antar pulau yang memperlancar gerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya.

Demikian juga hasil pembangunan bendungan-bendungan baru, waduk-waduk baru, pusat-pusat pembangkit tenaga listrik baru dengan jaringan distribusinya telah memungkinkan meningkatnya produksi pertanian dan industri serta meningkatkan kesejahteraan pada umumnya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Pembangunan yang kita laksanakan akhirnya adalah untuk manusia Indonesia, untuk kita semua. Sejak lama telah saya ingatkan bahwa pembangunan kita tidak lain adalah pembangunan manusia, pembangunan yang memanusiaikan manusia. Sebab manusia lah pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. Karena itu segala macam usaha ekonomi dan pembangunan yang kita

laksanakan secara terus menerus kita usahakan agar membawa rakyat kepada tingkat kesejahteraan, kehidupan dan harga diri yang lebih tinggi. Dalam kerangka perjalanan sejarah, maka pembangunan manusia itu berarti persiapan bangsa ini untuk mengemban tugas-tugas yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat yang makin rumit dan meningkat dalam dasawarsa-dasawarsa yang akan datang.

Salah satu unsur yang terpenting untuk itu adalah pendidikan dalam arti luas, pendidikan terus menerus seumur hidup. Untuk persiapan ke arah itu, sekaligus meningkatkan kecerdasan bangsa, maka kita melaksanakan pembangunan besar-besaran di lapangan pendidikan. Tekad kita ini jelas tampak dalam meningkatnya biaya yang disediakan oleh negara untuk pendidikan dan latihan, sehingga menduduki tempat yang teratas di atas semua sektor pembangunan yang lainnya. Berpangkal dari pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, maka usaha-usaha pendidikan diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas kesempatan belajar sehingga merata bagi setiap warganegara kita dan meningkatkan kaitan yang bermanfaat antara sistem pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Semua usaha itu mencakup seluruh tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai pendidikan tinggi, baik milik Pemerintah maupun swasta.

Dalam tahun ke-3 REPELITA III ini jumlah anak-anak yang tertampung di sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah mencapai lebih dari 27 juta orang anak, suatu peningkatan lebih dari 5% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dalam tahun 1981 /'82 kita membangun 15.000 gedung SD baru, menambah 25.000 kelas dan memperbaiki 25.000 gedung sekolah dasar lainnya. Untuk memperbaiki kesejahteraan guru sehingga para pendidik dapat mencurahkan sepenuh-penuh perhatian kepada anak-anak didiknya maka kita juga telah membangun hampir 21.000 buah rumah

dinas untuk Kepala Sekolah, guru dan penjaga sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan guru yang meningkat telah diangkat 70.000 orang guru klas, 22.000 orang guru agama dan lebih dari 11.000 orang penjaga sekolah. Pada pendidikan sekolah lanjutan telah dapat ditampung lebih dari 3,8 juta murid sekolah menengah tingkat pertama dan lebih dari 2 juta murid sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk sekolah-sekolah kejuruan. Dengan pembangunan gedung sekolah baru, perbaikan dan penambahan kelas maka terdapat kenaikan daya tampung sekitar 11% untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan 16% untuk sekolah lanjutan tingkat atas, jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pada pendidikan tinggi jumlah mahasiswa kita pada perguruan tinggi negeri maupun swasta berjumlah hampir 600.000 orang, yang merupakan kenaikan daya tampung sekitar 21% dari tahun sebelumnya. Kendatipun demikian tantangan di bidang pendidikan masih tetap besar.

Unsur penting lainnya bagi kesejahteraan rakyat dalam membangun manusia Indonesia adalah penyediaan perumahan. Dengan adanya rumah tinggal yang tetap dengan air bersih dan penerangan yang cukup, dengan lingkungan yang sehat dan segar, maka keluarga-keluarga akan hidup tenteram dan bahagia dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Sejalan dengan kemantapan ekonomi dan majunya pembangunan, maka kemampuan kita untuk membangun perumahan menjadi lebih besar, baik kemampuan masyarakat sendiri maupun kemampuan Pemerintah untuk membantu masyarakat. Asas pemerataan mengharuskan Pemerintah untuk memberi perhatian pada mereka yang berpenghasilan rendah dan sedang. Walaupun masih jauh dari mencukupi, namun pembangunan perumahan mencapai kemajuan-kemajuan pesat hingga sekarang ini. Dalam REPELITA III ini Perumnas akan membangun 120.000 buah rumah, terdiri dari Rumah Sederhana dan Rumah Inti, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jika dalam tahun 1980/'81 yang lalu Perumnas dapat membangun lebih dari 19.000 buah rumah, maka dalam tahun 1981 / '82 meningkat lagi menjadi lebih dari 23.000 buah, yang lebih dari 10.000 buah telah selesai dibangun sedangkan sisanya sedang dalam taraf pembangunan. Di samping pembangunan yang dilakukan oleh Perumnas, maka dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank Tabungan Negara, Pemerintah menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal untuk dihuni sendiri. Selama tiga tahun REPELITA III, Bank Jabungan Negara telah merealisasi KPR untuk membeli rumah non Perumnas sebanyak lebih dari 42.000 buah rumah dengan jumlah kredit hampir Rp. 160 milyar. Kredit semacam ini juga digunakan untuk membeli rumah-rumah Perumnas, yang dalam tahun ke-3 REPELITA III telah direalisasi lebih dari 27.500 buah rumah dengan nilai hampir Rp. 40 milyar. Sejak kita memasuki REPELITA III pemberian KPR itu tidak saja terbatas di kota-kota besar, melainkan mulai menyebar ke 99 Kabupaten di 19 Propinsi. Di samping itu Bank Tabungan Negara melalui Koperasi Pemuda Indonesia juga menyediakan fasilitas kredit untuk pembangunan asrama mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, sedangkan untuk masa datang Pemerintah sedang memikirkan kemungkinan pemberian kredit bahan bangunan perumahan.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah makin sulitnya mendapatkan tanah dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak di kota-kota besar dalam pembangunan perumahan ini. Karena itu, agar harga rumah tetap terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah dan sedang, maka telah dirintis pembangunan Rumah Susun (flat) di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Sistem pembangunan Rumah Susun ini dipadukan pula dengan usaha peremajaan kota di daerah pemukiman masyarakat yang tergolong kurang mampu terutama di kota-kota besar, yang perintisannya telah dimulai di Jakarta dan Palembang.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan membahagiakan, maka kita lanjutkan usaha perbaikan kampung di kota-kota besar serta pemugaran perumahan dan lingkungan di daerah pedesaan. Penerangan di waktu malam untuk desa-desa dan kebangkitan industri kecil di daerah pedesaan pun makin hari makin terasa dengan adanya Listrik Masuk Desa. Untuk tahun ke-3 REPELITA III ada tambahan lebih dari 850 desa yang mendapat penerangan listrik dan dapat dinikmati oleh sekitar 122.000 keluarga. Hingga sekarang program listrik pedesaan ini telah menerangi 4.170 desa dan dinikmati oleh hampir 730.000 konsumen. Kegiatan ini akan dilanjutkan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Perbaikan-perbaikan juga banyak kita lakukan dalam penyediaan air bersih. Selama tiga tahun REPELITA III telah di tingkatkan penambahan pelayanan air bersih melalui pembangunan pusat-pusat pembersihan air, penyambungan pipa-pipa saluran ke rumah-rumah dan pembuatan hidran-hidran umum, hingga dapat meningkatkan jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih dan dengan demikian juga meningkatkan kesejahteraannya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Saya telah mengajak kita semua untuk melihat kembali perjalanan dan posisi kita dalam sejarah bangsa kita. Dalam dasawarsa '80 ini kita mencapai tingkat kemajuan dalam berbagai bidang dan peromahan-perubahan besar telah terjadi dan akan terus terjadi. Karena itu kita melihat bahwa masa di hadapan kita penuh dengan harapan. Di lain pihak kita menyadari bahwa kita masih dihadapkan kepada masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan yang memerlukan pemecahan.

Di bidang ekonomi dan pembangunan tantangan terbesar yang kita hadapi adalah masalah kependudukan dalam arti yang luas. Persoalan terpokok kita adalah pengembangan kemampuan manusia Indonesia sehingga bangsa kita mampu terus menggerakkan pembangunan yang harus makin meningkat, meluas dan penuh kedalaman.

Untuk itu lah, seperti saya katakan tadi, kita telah memusatkan perhatian pada pembangunan pendidikan. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan berbagai macam kemampuan dan ketrampilan dalam segala tingkatan dan lapangan. Tanpa ini maka industrialisasi yang harus kita galakkan dalam tahap pembangunan yang akan datang pasti akan mengalami hambatan.

Erat hubungannya dengan masalah kependudukan ini adalah masalah kesempatan kerja. Dari hasil sensus penduduk 1980 jumlah penduduk kita mencapai lebih dari 147 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,3% setahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja, terutama di kalangan generasi muda. Apabila menjelang REPELITA III dahulu kita perkirakan tambahan angkatan kerja akan berjumlah sekitar 6,5 juta orang, sekarang ternyata bahwa angka itu lebih besar lagi. Di samping itu kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja kita terdapat di daerah pedesaan, dan mereka ini kurang memiliki ketrampilan. Jawaban sementara yang dapat kita berikan adalah memperluas kesempatan kerja yang tidak memerlukan ketrampilan. Namun langkah ini bersifat sementara. Karena itu kita usahakan peningkatan perencanaan tenaga kerja yang terpadu secara nasional, yang merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan kita.

Betapa besar masalah tenaga kerja ini dapat kita lihat misalnya pada meningkatnya jumlah petani, petani penyekap, petani

penggarap dara buruh tani. Dari tahun '73 sampai tahun '80 jumlah petani meningkat dengan 2,8% setahun yaitu dari 14 juta orang menjadi 17 juta orang lebih. Petani yang menggarap sawah kurang dari 1 hektar meningkat dari 6,6 juta orang menjadi 11 juta orang, atau naik rata-rata dengan 7,7% setiap tahun. Petani penggarap naik dari 450 ribu orang menjadi 2,6 juta orang, yang berarti naik dengan 28% setahun. Perkembangan tadi menunjukkan bahwa tambahan tenaga kerja sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk belum banyak diserap oleh sektor-sektor lain di luar pertanian. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang masuk ke dalam sektor pertanian sebagai petani dan buruh tani cukup besar yang sebagian terbesar berpusat di pulau Jawa. Tambahan tenaga kerja ke dalam sektor pertanian jauh lebih banyak dari luas tanah pertanian baru yang dapat kita buka, yang membawa akibat menyempitnya tanah pertanian yang diusahakan oleh seseorang. Ini menunjukkan, sekali lagi, bahwa tantangan terbesar kita di masa datang adalah memperluas kesempatan kerja di luar bidang pertanian, dan melaksanakan transmigrasi besar-besaran di luar pulau Jawa yang masih sangat luas.

Apabila tadi saya katakan bahwa tidak kurang dari 11 juta keluarga petani yang menggarap sawah yang lebih sempit dari $\frac{1}{2}$ hektar, maka hal ini merupakan tantangan bagi program transmigrasi, karena menggarap sawah kurang dari $\frac{1}{2}$ hektar tidak akan mencukupi hasilnya untuk keluarga yang bersangkutan. Dengan segala tekad kita untuk mengembangkan industri yang dapat memperluas kesempatan kerja, namun segera tampak bahwa di tahun-tahun mendatang keberhasilan dalam melaksanakan transmigrasi merupakan salah satu kunci jawaban mengenai masalah kependudukan. Selama REPELITA III ini kita akan mentransmigrasikan $\frac{1}{2}$ juta keluarga. Angka ini sungguh merupakan kemajuan besar jika dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Namun dilihat dari tantangan yang saya gambarkan tadi, jumlah

yang harus bertransmigrasi tidak bisa lain harus ditingkatkan dalam REPELITA yang akan datang.

Kunci terpenting lainnya dari pemecahan masalah kependudukan adalah lebih ditingkatkannya pelaksanaan keluarga berencana. Memang, di antara barisan negara-negara yang sedang membangun, kita tergolong yang berhasil dalam menurunkan tingkat kelahiran melalui gerakan keluarga berencana yang telah menjadi gerakan nasional. Apabila dalam tahun 1967 – 1970 dahulu angka kelahiran mencapai 4,4% maka dalam tahun 1976 - 1979 angka kelahiran telah dapat ditekan sampai 3,6%. Ini sangat membesarkan hati. Namun karena angka kematian menurun dengan pesat sekali, maka besarnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahun masih sebesar 2,3%. Karena itu pelaksanaan program keluarga berencana masih harus lebih kita tingkatkan lagi. Kita bertekad agar dalam tahun sembilan puluh nanti angka kelahiran dapat diturunkan menjadi $\frac{1}{2}$ dari angka kelahiran tahun tujuh puluh, yaitu menjadi 2,2% saja.

Untuk itu gerakan keluarga berencana harus benar-benar meluas dan memasyarakat. Semua lapisan masyarakat perlu dibangkitkan kesadarannya. Secara nasional berhasil atau gagalnya pelaksanaan keluarga berencana akan sangat menentukan maju atau mundurnya pembangunan kita. Jumlah penduduk yang besar jika tidak disertai dengan kesempatan kerja dan penghasilan yang baik, jika tidak disertai dengan peningkatan produksi dan pemenuhan segala kebutuhan dasar manusia, jika tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang memadai, akan berbalik menjadi sumber keresahan sosial yang lebih sulit kita atasi.

Tugas dan tantangan besar lainnya yang harus kita jawab dalam tahap-tahap pembangunan selanjutnya adalah terwujudnya demokrasi ekonomi seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar kita, dengan koperasi sebagai salah satu sokogurunya. Jika sektor negara telah mulai kuat, jika sektor swasta telah mulai

bergerak maju, maka tanpa kekuatan koperasi, ekonomi nasional kita tidak akan mampu menjadi landasan untuk mencapai cita-cita nasional ialah masyarakat yang berkeadilan sosial.

Tahun-tahun terakhir ini terasa kebangkitan kembali koperasi di mana-mana. Ini merupakan awal baru yang sangat baik. Di bidang pertanian di daerah pedesaan peranan koperasi sudah sangat menonjol. Melalui KUD di daerah pedesaan penyebaran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran produksi dapat dikatakan telah sebagian besar berada di tangan koperasi. Telah menjadi tekad Pemerintah agar koperasi inilah yang memegang peran utama dalam produksi dan pemasaran sektor pertanian pangan. Dari pengalaman di bidang koperasi sektor pangan ini akan kita lanjutkan untuk meningkatkan peranan dan usaha koperasi disektor-sektor lainnya, sehingga peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi Indonesia makin besar.

Tantangan-tantangan yang kita hadapi jelas tidak ringan, tetapi kami yakin dengan bekerja keras dari kita semua akan dapat kita atasi.

Dalam pada itu kita juga menyadari bahwa pembangunan memerlukan rangsangan-rangsangan yang terus menerus, memerlukan semangat dan kesegaran-kesegaran baru. Juga memerlukan pikiran-pikiran baru dan kepercayaan akan masa depan. Di sini penting sekali berkembangnya komunikasi sosial terutama melalui sarana media massa, seperti RRI, TVRI dan pers nasional kita pada umumnya. Sarana-sarana komunikasi sosial itu terus kita perbaiki baik segi-segi teknis maupun mutunya. Kemampuan RRI terus dimantapkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Nusantara yang luas ini dan juga di dunia luar. Kemajuan-kemajuan pesat juga dicapai oleh TVRI. Dalam usaha pemerataan siaran ke seluruh pelosok Indonesia, pada saat ini TVRI telah memiliki 146 buah stasiun pemancar dan stasiun penghubung, sehingga hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpen-

cil dan daerah perbatasan kini telah dapat dijangkau oleh siaran televisi kita. Di samping 9 buah stasiun penyiaran televisi yang telah kita miliki di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, kita juga telah memiliki sejumlah unit produksi televisi mobil yang dapat memproduksi siaran langsung dari daerah-daerah terpencil, sehingga diharapkan kita akan dapat meningkatkan siaran-siaran televisi mengenai keadaan daerah, baik keindahan alam dan budayanya, maupun hasil karya dan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan kemajuan dan kemampuan siaran RRI dan TVRI itu maka rakyat secara terus menerus, dari ari ke hari mengetahui benar masalah-masalah apa yang kita hadapi, usaha-usaha apa yang sedang kita kerjakan dan hasil-hasil apa yang kita capai dalam pembangunan.

Perkembangan pers nasional juga bergerak kearah yang makin mantap, terutama karena makin tumbuhnya sikap bebas dan bertanggung jawab. Untuk kesekian kalinya saya tegaskan di sini bahwa kita tidak menginginkan pers yang diam seribu bahasa terhadap kekurangan yang memang ada pada tubuh kita sebagai bangsa, termasuk tubuh aparatur pemerintahan. Pers harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kontrol sosial secara efektif dan konstruktif. Dalam rangka ini yang kita perlukan adalah pers pembangunan yang mampu menyajikan berita dan ulasan membangun yang jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan menyadari segala kekurangan, kita tetap, mempunyai kepercayaan pada masa depan. Dalam rangka inila maka Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pokok Pers, yang mudah-mudahan dapat diselesaikan oleh Dewan yang terhormat bersama Pemerintah dalam masa sidang ini.

Pembangunan nasional kita yang makin tahun makin meningkat, baik dalam jumlah anggaran maupun jenis kegiatan yang dilakukan, dan yang telah menumbuhkan sistem nasional yang

telah jauh berkembang dan makin kompleks, jelas meminta perhatian yang lebih besar, ketrampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi, dan terlebih lagi suatu sikap yang lebih matang: suatu disiplin pembangunan.

Disiplin pembangunan ini perlu diperkuat pada setiap pelaksanaan dan aparatur pembangunan, sehingga dana dan daya dapat terpakai dengan baik, efektif dan efisien mencapai tujuan pembangunan yang lebih jauh.

Dalam usaha menegakkan disiplin pembangunan ini, timbul tuntutan yang lebih tinggi terhadap para manajer pembangunan yang menjadi atasan langsung dari para pelaksana pembangunan untuk menggalakkan fungsi pengawasan melekat, di samping pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan sendiri. Untuk itu pada tahap sekarang ini telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan aparat pengawasan, antara lain dengan : penyempurnaan sistem koordinasi pengawasan di tingkat Pusat maupun Daerah, penataran-penataran untuk aparat pengawas seluruh departemen/lembaga dan berbagai mekanisme untuk mendorong tindak lanjut dari hasil pengawasan.

Usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengefektifkan lagi pelaksanaan pengawasan ini masih perlu dilakukan untuk menjawab tantangan dan peningkatan pembangunan di masa depan. Bagaimana pun juga , derap langkah pengawasan harus seirama dengan peningkatan pembangunan karena pengawasan itu kita adakan bukan untuk menghambat kegiatan pembangunan, tetapi justru sebaliknya, untuk menunjang dan memperlancar pembangunan.

Saudara-saudara yang terhormat;

Seperti telah saya singgung di muka keadaan stabilitas keamanan kita selama ini cukup mantap. Bahkan telah melampaui dengan selamat situasi yang peka dan rawan, seperti dalam masa kampanye dan pelaksanaan Pemilu yang lalu.

Hal ini terutama berkat kewaspadaan dan kesadaran masyarakat yang tidak mudah terseret pada gelombang gerakan dan issue-issue yang tidak bertanggung jawab dan juga berkat kewaspadaan dan kesigapan bertindak oleh alat-alat negara -ABRI- yang selalu siap siaga untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu kita masih harus memberikan perhatian yang lebih serius untuk memberantas secara tuntas para pelaku kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan kekejaman yang akhir-akhir ini terjadi seperti perampokan, pembajakan bis dan sebagainya. Saya minta agar seluruh jajaran ABRI, khususnya POLRI sebagai alat penegak hukum, dapat mengatasi gangguan yang meresahkan masyarakat itu.

Bersamaan dengan itu, maka pembangunan ABRI untuk meningkatkan kemampuan ABRI sebagai pelindung kedaulatan negara dan keamanan rakyat dan ancaman dari luar maupun dari dalam terus ditingkatkan, baik dengan memodernisir persenjataan-nya maupun dengan meningkatkan kemampuan teknis dan keampilannya.

Langkah berikutnya yang perlu kita ambil dalam memantapkan pembangunan pertahanan keamanan adalah membangun kemampuan hankam kita berdasarkan Hankamrata secara nyata di daerah-daerah. Kita juga telah mulai menaruh perhatian pada pembangunan industri pertahanan keamanan, yang kita letakkan dalam kerangka besar pembangunan industri khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Untuk memberikan landasan hukum yang memadai dalam rangka melanjutkan pembangunan Hankam/ABRI selanjutnya, maka dewasa ini sedang diadakan pembahakan RUU Pokok Pertahanan Negara oleh Dewan yang terhormat bersama Pemerintah yang diharapkan dapat secepatnya dirampungkan.

Saudara Ketua yang terhormat;

Sementara kita memusatkan perhatian kepada usaha pembangunan yang merupakan tugas sejarah dewasa ini, maka kita juga tidak dapat tinggal diam terhadap gejolak dan pergolakan yang terjadi di berbagai bagian dunia.

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar maka kita harus berusaha untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka ini maka kita tetap berpegang teguh pada politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan pembangunan nasional.

. Dengan semangat yang demikian itulah kita bersikap dan mengambil langkah-langkah ke luar melalui berbagai forum yang tersedia.

Perhatian kita yang besar tetap kita arahkan pada konsolidasi organisasi ASEAN, yang makin hari makin menyatukan pandangan-pandangan politik dalam menghadapi masalah-masalah regional maupun internasional dan makin luasnya kerjasama ekonomi dan pembangunan di antara kelima negara anggotanya.

Terhadap masalah Kampuchea sikap kita sejak semula sudah jelas, -yang juga merupakan sikap ASEAN-, ialah kita ingin melihat Kampuchea hidup sebagai negara yang berdaulat dan damai. Sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Kampuchea sendiri lah yang berhak menentukan pemerintahannya sendiri, masa depannya sendiri, tanpa campur tangan dari luar. Dalam rangka inilah maka Indonesia -juga ASEAN- mendukung Pemerintahan Koalisi Kampuchea yang terbentuk baru-baru ini. Dan kehadiran tentara asing di negara itu yang tidak dikehendaki oleh rakyat Kampuchea harus segera ditarik keluar dari wilayah Kampuchea, karena jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan bertetangga yang bersahabat dan tidak memungkinkan

rakyat Kampuchea untuk menentukan pemerintahannya sendiri dengan cara yang demokratis.

Perkembangan lain yang tetap memprihatinkan adalah keadaan di Afganistan yang belum juga berubah. Di sana pun kehadiran tentara asing tidak akan menjamin kedaulatan Afganistan yang harus kita hormati, dan karenanya juga harus ditarik keluar.

Sementara itu perkembangan di Timur Tengah tambah mengkhawatirkan. Perang antara dua negara tetangga, antara dua sesama negara Islam -Iran dan Irak- terus berlangsung berkepanjangan. Sebagai negara dengan penduduk muslimin terbesar di dunia, sebagai sahabat, kita menghimbau kedua belah pihak agar mencari penyelesaian damai atas persengketaan di antara mereka dengan semangat ukhuwah Islamiah. Perang antara kedua negara itu memperlemah persatuan negara-negara, Arab yang justru mutlak diperlukan untuk melawan agresi Israel yang akhir-akhir ini dengan congkak dan melanggar perikemanusiaan telah menyerbu Lebanon dan Ibukota Beirut, membunuh dan mengejar-ngejar orang-orang Lebanon dan Palestina. Dalam hal ini sikap kita sangat jelas sejak semula, ialah berpihak pada bangsa-bangsa Arab yang berjuang melawan agresi Israel dan berdiri di sisi rakyat Palestina untuk mendapatkan haknya menentukan masa depannya sendiri dan memperoleh Tanah Airnya.

Dalam pada itu perjuangan kita mengenai Wawasan Nusantara mencapai hasil di forum internasional. Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke-III baru-baru ini telah menerima baik Konvensi tentang Hukum Laut. Hal ini merupakan satu tonggak sejarah bagi masyarakat internasional, terutama karena untuk pertama kalinya diciptakan suatu regim hukum yang menyeluruh dan mengatur penggunaan laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk di dasar lautan.

Bagi Indonesia keputusan Konperensi itu juga sangat penting dan bersejarah, karena keputusan tersebut merupakan jaminan dan pengakuan hukum internasional terhadap negara nusantara-negara kepulauan- yang sesuai dan menjamin terlaksananya Wawasan Nusantara. Kita berharap agar konvensi ini dapat segera ditanda tangani dan diratifikasi oleh negara-negara yang bersangkutan agar konvensi dapat segera berlaku. Yang penting bagi kita adalah menyiapkan segala langkah untuk memberi isi kepada Wawasan Nusantara itu, khususnya dalam menggali dan memanfaatkan kekayaan laut bagi kemakmuran kita bersama.

Para Anggota Dewan yang terhormat;

Demikianlah, saya telah mengajak kita semua untuk melihat posisi sejarah kita pada saat-saat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-37 ini. Kita melihat bahwa kita telah mengalami perubahan-perubahan besar dan kemajuan-kemajuan pesat dalam membangun diri. Ini lah yang kita syukuri dan mengharuskan kita untuk melanjutkan apa yang telah kita kerjakan sampai sekarang. Namun kita juga menyadari, bahwa tugas-tugas besar tetap menunggu keraa keras kita semuanya baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Ini lah yang mengharuskan kita untuk terus bekerja keras, dengan semangat tinggi dan kegairahan yang besar.

Dengan bersyukur atas hasil-hasil yang kita capai sampai sekarang serta dengan menyadari tantangan-tantangan sosial ekonomi yang harus kita tundukkan di masa datang, kita bertekad untuk melanjutkan dan mempercepat perjalanan pembangunan kita.

Kita yakin, tekad itu akan dapat terwujud karena selama ini dengan segala kekurangannya, dengan teguh berpegang kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar '45, ternyata kita selalu dapat memecahkan masalah dan mengatasi tantangan yang kita hadapi.

Kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada para Anggota Dewan yang terhormat ini, karena DPR telah bekerjasama dengan baik dengan saya sesuai dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar '45. Saya kemukakan rasa terima kasih itu dari lubuk hati saya, karena Sidang ini adalah sidang terakhir yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara dengan para Anggota Dewan yang terhormat, yang telah bekerja selama hampir lima tahun.

Karena banyaknya masalah dan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi, tidak terasa hampir lima tahun telah lewat, sejak Saudara-saudara semua -sebagai Anggota MPR-memilih dan mengangkat saya sebagai Presiden/Mandataris Majelis. Selama itu kita bersama telah banyak memperkuat dan memberi isi kepada praktek kehidupan kenegaraan yang konstitusional. Selama itu, Dewan bersama-sama Pemerintah, telah banyak menghasilkan Undang-undang yang sangat penting.

Selama hampir lima tahun yang lalu, tidak sedikit kritik yang dilontarkan oleh para Anggota Dewan yang terhormat ke alamat Pemerintah. Kritik-kritik itu saya terima dengan penuh penghargaan, karena kritik-kritik itu memang berguna. Juga tidak sedikit dukungan para Anggota Dewan pada kepemimpinan saya dan kebijaksanaan Pemerintah. Dukungan itu saya hargai, karena terasa memberi semangat untuk terus maju bagi kita bersama.

Saya memberi bobot yang sama besarnya kepada kritik dan dukungan, karena kedua-duanya merupakan bagian dari demokrasi yang harus dan sedang terus kita tumbuhkan.

Pada tanggal 1 Oktober yang akan datang, menurut rencana, Anggota Dewan dan Anggota Majelis yang baru, yang merupakan hasil Pemilihan Umum, akan dilantik. DPR dan MPR secara keseluruhan akan berganti. Presiden baru pun akan dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum bulan Maret tahun depan.

Secara konstitusional tugas kita yang sekarang sebagai lembaga negara akan berakhir. Namun bagi pecinta-pecinta demokrasi, bagi penegak-penegak konstitusi, bagi penggerak-penggerak pembangunan, kita selalu siap sedia untuk melanjutkan tugas dimanapun tempat dan bidangnya. Lapangan pengabdian kita dapat saja berbeda. Tetapi tujuan kita tetap sama, ialah mengabdikan diri bagi kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial dalam membangun Masyarakat Pancasila. Karena itu, saat-saat pembicaraan saya terakhir di hadapan Saudara-saudara semua, saya ingin mengatakan : sampai bertemu kembali pada tugas-tugas pengabdian yang baru nanti.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.
Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO